

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

B. Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023 Tahun 2024 Tentang Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi 2024, Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tahun 2021, Jakarta.

- L. Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mertoskusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Bushar, 1985, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Otje Salman, R., 1983, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Parlindungan, A. P., 1993, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Parlindungan, A. P., 2002, *Pendaftaran Tanah Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV. Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2013, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Taufiq Hidayat, Achmad, 2021, *Tinjauan Empiris Keragaan Penatagunaan Tanah Timbul di Desa Singaraja Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat*, Prosiding Seminar Nasional Hari Air Dunia, Palembang.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yamin Lubis, Mhd. dan Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Bandar Maju, Bandung.
- Yosua, Suhanan, 2010, *Hak atas Tanah timbul (aansbling) dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Restu Agung, Jakarta.

C. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

- Achmad, Sodiki, 1994, “Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum)”. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Andi, Amalia Handayani, “Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 1 (2019) ISSN: 2086-1702.
- Apit, Rina Palupi, “Analisis Praktik Jual Beli Tanah Yang Berstatus Letter C Di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen”, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 2 (2019) ISSN: 2086-1702.
- Arina, Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, “Hukum Tanah Adat/Ulayat”, *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, Vol. 4, No. 1. 2019.
- Deni Lesmana Andimiharja, “Kedudukan Tanah Timbul Di Wilayah Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019.
- Elzha, Putri Widya Yurisa, “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Registrasi Desa (Letter C) di Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 3 Issue 2(2022).
- Harris, Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali”, *Negara Hukum*: Vol. 2, No. 2, November 2011.
- https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/, Review Rpi2-Jm Bidang Cipta Karya Kabupaten Madiun Tahun 2016 – 2019, Diakses pada tanggal 30 Desember 2021.
- <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-sedimentasi-dan-jenis-jenisnya>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 20.25
- Masyithah, Utrujah Dwi Natsir, “Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong”, Skripsi, Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016.
- Sudiyono, “Perolehan Hak Atas Tanah Menjadi Sertifikat Dengan Letter C”, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume XIV, Nomor 2, November 2016: 1513-1527.

Suparno, “Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah Di Sekitar Bantaran Sungai Di Kota Surakarta”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Wahanisa Dan Arif Hidayat, "Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah", Jurnal Pandecta, Edisi No. 1 Vol 3, 2009.

Yoppie, Christian, Iregularitas Agraria “Tanah Timbul” (Aanslibbing) Dan Perubahan Lanskap Di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 5 No. 2 November 2019.

Yulyanti M. Rampengan, “Kedudukan Hukum Registrasi Desa (Letter C) Dalam Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 4, 2016.